

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI BALI

Putu Ayu Krisna Dewi
I Ketut Sutrisna

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia menjadi salah satu target pemerintah daerah dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dapat membiayai pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada kenyataannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum tentu meningkatkan kesejahteraan. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang masih belum merata pada setiap daerah menimbulkan ketimpangan pembangunan manusia pada daerah dengan presentase pertumbuhan ekonomi rendah. Hal ini terjadi karena pemerintah belum bisa menyediakan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan data rasio keuangan yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Analisis rasio digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil analisis menunjukkan secara simultan kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM, secara parsial kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

Regional financial independence and economic growth to human development is one of local government target in the successful implementation of regional autonomy. By increasing Local Original Income, local governments can finance the implementation of public services to improve their welfare. In fact the original income increase is not sure can improve welfare. In addition, economic growth which is still not evenly distributed in every region causes imbalance of human development in the region with the low economic growth percentage. This happens because the government has not been able to provide public services. The purpose of this study was to determine the impact of the regional financial independence and economic growth to human development. This study used financial ratio data and multiple linear regression analysis. Ratio analysis was used to determine the level of regional financial independence at the regency / city in the province of Bali. The analysis result showed that simultaneous regional financial independence, economic growth influenced significantly on the human development index, partially regional financial independence and economic growth influenced positively on the human development index.

Keywords: Regional Financial Independence, Economic Growth, and the Human Development Index

PENDAHULUAN,

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengambil keputusan dan pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat yang bersangkutan (Boex, 2001: 13). Secara teoritis tujuan desentralisasi adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, membangun demokrasi lokal dan menghargai keragaman lokal, dan tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah (Astri, 2013). Dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran publik seperti pendidikan,

kesehatan, dan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era desentralisasi fiskal bergantung kepada penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional atau pemerintahan daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Oates juga mengatakan bahwa desentralisasi fiskal juga meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, penerimaan keuangan daerah bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	21,235	33,952	34,380	41,330	46,470
Tabanan	87,379	93,840	107,836	141,046	183,295
Badung	449,674	850,170	979,241	1,406,298	1,870,187
Gianyar	96,922	112,380	153,617	175,273	261,222
Klungkung	29,028	29,566	31,331	40,735	48,561
Bangli	12,655	16,329	16,252	22,961	40,751
Karangasem	43,005	47,842	62,696	129,556	144,019
Buleleng	52,662	63,487	86,92	109,167	129,003
Denpasar	176,072	215,156	257,899	424,959	511,326
BALI	1,055,454	1,163,947	1,393,730	1,723,807	2,042,091

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014

Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan secara umum bahwa terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012. PAD dinilai sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemandirian suatu daerah kepada pemerintah pusat dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Delavallade (2006) menyebutkan bahwa anggaran dalam bidang infrastruktur publik diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang kesejahteraan sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan manusia.

Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia yang dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi

yang tidak memperhatikan manusia tidak akan bertahan lama (*sustainable*) karena pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional (Firda, 2014). Blakely *et al.* (2002) mengatakan dalam meningkatkan produktivitas, pemerintah dapat menggunakan strategi *Local Economic Development* (LED). Peningkatan produktivitas, akan menyerap tenaga kerja sehingga tenaga kerja memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi berikutnya. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993).

Produk Domestik Regional Bruto selama ini digunakan sebagai ukuran penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi era otonomi daerah. Wilayah dengan PDRB tinggi, belum tentu memiliki IPM yang tinggi pula sebaliknya wilayah dengan tingkat IPM rendah belum tentu tingkat PDRB daerah tersebut juga rendah.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Kabupaten/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	1.586,805	1.663,345	1.739,283	1.836,899	1.945,292
Tabanan	2.221,759	2.342,711	2.475,715	2.619,687	2.774,393
Badung	5.196,125	5.528,320	5.886,369	6.280,211	6.738,908
Gianyar	3.009,320	3.187,822	3.380,512	3.609,055	3.854,010
Klungkung	1.182,357	1.240,542	1.307,888	1.383,890	1.467,352
Bangli	984,129	1.040,363	1.092,116	1.155,898	1.225,103
Karangasem	1.663,749	1.747,169	1.836,131	1.931,438	1.042,135
Buleleng	3.078,504	3.266,342	3.457,475	3.668,884	3.907,935
Denpasar	5.029,895	5.358,246	5.710,412	6.097,167	6.535,171
Bali	25.910,325	27.290,945	28.882,493	30.757,776	32.804,381

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014

Berdasarkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adanya peningkatan PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tiap tahunnya terus mengalami peningkatan signifikan yang menandakan bahwa Bali berhasil menjalankan program otonomi daerah. Provinsi Bali dengan perbedaan pola dan struktur daerah perekonomian yang terdapat pada masing-masing daerah menjadi sumber ketimpangan yang juga berdampak terhadap indeks pembangunan manusia yang masih belum merata untuk semua daerah. Perubahan paradigma sebagai langkah dalam meningkatkan pembangunan manusia, pembangunan dilakukan dengan pendekatan ekonomi yang bersifat humanis (*people center development*) dengan menjadikan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan tidak sebagai alat pembangunan.

Whithaker dan Federico (1997) menyebutkan kesejahteraan merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat jasa dalam membantu masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dengan presentase yang baik menunjukkan bahwa dalam daerah tersebut tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Tabel 3 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali periode 2008-2012 setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan, namun masih terdapat daerah dengan tingkat IPM

yang rendah dibandingkan wilayah lain seperti Karangasem dan Klungkung dengan tingkat IPM yang masih dibawah Kabupaten lain.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2012 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	72,02	72,45	72,69	73,18	73,62
Tabanan	73,73	74,45	72,69	73,18	73,62
Badung	74,12	74,49	75,02	75,24	75,55
Gianyar	72,00	72,43	72,73	73,43	74,49
Klungkung	69,66	70,19	70,54	71,02	71,76
Bangli	69,72	70,21	70,71	71,42	71,8
Karangasem	65,46	66,06	66,42	67,07	67,83
Buleleng	69,67	70,26	70,69	71,12	71,93
Denpasar	77,18	77,56	77,94	78,31	78,7
BALI	70,98	71,52	72,28	72,84	73,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2014

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012
- 3) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Bali periode 2008-2012

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dan objek penelitiannya adalah kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah dan regresi linier berganda. variabel kemandirian keuangan daerah didapatkan dengan cara membandingkan PAD dengan total belanja daerah. Persamaan regresi linier berganda dituliskan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

Y = Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012

X₁ = Rasio kemandirian keuangan daerah 2008-2012

X₂ = pertumbuhan ekonomi periode 2008-2012

α = Konstanta

β₁, β₂ = Koefisien Regresi

μ = Kesalahan Pengganggu

Selanjutnya persamaan regresi tersebut akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan data yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan kondisi kemampuan dari suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya (Gregorius, 2011). Semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin mandiri pula suatu daerah tersebut. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa Kabupaten Badung memiliki rasio kemandirian yang cukup tinggi dibandingkan Kabupaten lain setiap tahun. Kabupaten Bangli dengan rasio kemandirian yang rendah, ini mencerminkan bahwa Kabupaten Bangli masih bergantung dalam hal sumber dana dari pemerintah pusat. Rendahnya kemandirian keuangan daerah disebabkan minimnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan PAD (Enceng 2012). Tingkat kemandirian fiskal minim karena adanya peningkatan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber penerimaan di daerah sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik terjamin (Sriyana, 2011).

Tabel 4 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali 2008-2012 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	4,78	7,09	6,93	7,55	6,99
Tabanan	13,55	13,39	13,25	15,98	17,20
Badung	36,09	59,48	74,23	89,44	80,12
Gianyar	15,40	15,67	20,37	19,39	25,95
Klungkung	7,31	6,58	7,08	8,23	8,10
Bangli	3,09	3,82	3,45	3,99	6,88
Karangasem	7,13	7,27	9,57	16,16	15,27
Buleleng	7,36	8,21	10,38	18,52	11,48
Denpasar	26,70	27,27	27,47	38,62	39,04

Sumber :Badan Pusat Statistik Bali, 2014. Data Diolah

Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2008-2012 (dalam persen)

Kabupaten/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	5,05	4,80	4,56	5,60	5,90
Tabanan	5,20	5,44	5,67	5,80	5,90
Badung	6,91	6,39	6,48	6,69	7,30
Gianyar	5,80	5,93	6,00	6,70	6,80
Klungkung	5,00	4,92	5,42	5,81	6,00
Bangli	4,00	5,70	4,97	5,80	5,98
Karangasem	5,00	6,77	5,09	6,70	5,73

Buleleng	5,80	6,10	8,43	6,10	6,50
Denpasar	6,83	6,53	6,57	6,77	7,18
BALI	5,97	5,33	5,83	6,49	6,65

Sumber :Badan Pusat Statistik Bali, 2014. Data Diolah.

Berdasarkan Tabel 5 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Badung dengan laju pertumbuhan sebesar 7,30% , dan pertumbuhan terendah di Kabupaten Karangasem dengan laju pertumbuhan sebesar 5,73% dan Kabupaten Jembrana dan Tabanan dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,90% pada tahun 2012.

Hasil Regresi Linier Berganda

$$\begin{aligned}
 Y &= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu \dots\dots\dots (2) \\
 \hat{Y} &= 68.849 + 0.084X_1 + 0.303X_2 \\
 Se &= (1.167) \quad (0.020) \quad (0.158) \\
 t &= (59,004) \quad (4,309) \quad (1,914) \\
 Sig &= (0.000) \quad (0.000) \quad (0.062) \\
 R^2 &= 0.348 \quad F = 11,210
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji statistik F, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,210 dengan nilai sig. $F_{hitung} = 0,000 < \alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel independen kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan simultan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di provinsi Bali periode 2008-2012. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat. Jika mengalami peningkatan yang baik, pembangunan ekonomi dapat dikatakan baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat direpresentasikan dengan pembangunan manusia yang oleh PBB menetapkan ukuran pembangunan manusia dengan Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator kualitas pembangunan manusia yang terdapat komponen utama didalam adalah angka harapan hidup dalam pencapaian dibidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dalam pencapaian bidang kesehatan, dan standar kehidupan layak.

Puji (2008) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang beranekaragam dengan perbedaan level desentralisasi mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana umum. Abimanyu (2005) menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah dalam penerapan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan secara mandiri dimana dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut, pelayanan publik perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, anggaran belanja untuk pelayanan publik harus lebih besar dibandingkan belanja rutin.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,309 dengan nilai sig. $t_{hitung} = 0,000 < \alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri atas kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Firda (2014) serta Eko (2013) menyebutkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah atau kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Kemandirian keuangan daerah yang tinggi menggambarkan bahwa suatu daerah telah mampu memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri dan campur tangan pemerintah dalam skala kecil. Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara

dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik (Aswin, 2011). Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,914 dengan nilai sig. t_{hitung} $0,000 < \alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2008-2012. Penelitian Ramirez (1998) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks pembangunan manusia sebagai ukuran dari kesejahteraan masyarakat. Decta (2013) menyebutkan bahwa Pertumbuhan dan pembangunan manusia (IPM) mempunyai hubungan dua arah yang meskipun tidak berhubungan secara otomatis namun dapat diperkuat dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan pembangunan manusia tidaklah bertahan lama. Denni (2012) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya taraf hidup, akhirnya menjamin kemakmuran masyarakat, meningkatkan tahap kesehatan, keharmonisan serta kesejahteraan yang berkelanjutan yang akan dapat melangsungkan pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berdampak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Berdasarkan pada hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap indeks pembangunan manusia dimana jika kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi meingkat, maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Kemandirian keuangan daerah secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Berdasarkan pada hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan simpulan yang diuraikan sebelumnya, berikut saran yang dapat diberikan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali lebih meningkatkan peranan desentralisasi fiskal untuk melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis komoditi potensi

daerah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan lebih terfokus pada pemerataan pendapatan pada daerah yang masih tertinggal. Pemerintah diharapkan lebih intensif meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan menambah alokasi anggaran dari APBD, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakatnya.

REFERENSI

- Abu bakar, Abu Sufian & Anizah MD. Ali. 2004. *Kepentingan Modal Sosial dalam Pertumbuhan Ekonomi*. IJMS 11 (SPECIAL ISSUE), 197-212 (2004). Fakultas Ekonomi Universiti Utara Malaysia.
- Anand, Sudhir and Martin Ravallion. 1993. "Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services". *The Journal of Economic Perspectives*. Vol. 7. No. 1 (Winter, 1993):133-150.
- Astri, Meylina et al. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis Vol 1, No.1.UNJ*. Jakarta
- Aswin Rizkiano. 2011. Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2004-2008 Di Kota Salatiga. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro. Semarang.
- Blakely, Edward J. and Ted K. Bradshaw. 2002. Planning Local Economic Development; Theory and Practice. *Journal*. 3rd edition Sage Publication, London and New Delhi.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Bali Dalam Angka Tahun 2013*. Bali.
- Boex, Jameson. 2001. "An Inductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relation. *Working Paper*. Word Bank Institute
- Deca Pitron Lugastoro. 2011. Analisis Pengaruh Pad Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang .2013
- Denni, Sulistio Mirza. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah. *Jurnal*. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Delavallade, Clara. 2006. "Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries". *Journal of Economics and Finance*. Vol. 30. No. 2: 222-239.
- Eko, Wicaksono Pambudi. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 2013.
- Enceng, Liestyodono et al. 2012. Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. *Jurnal*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. FISIP. Universitas Terbuka. Banten.

- Firda, Rizky Amalia. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.
- Gehi Batafor, Gregorius. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi NTT. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.
- Oates, W.E. 1993. Fiscal Desentralization and Economic Development. *National Tax Journal*. LXVI (2). 237-43.
- Puji Wibowo. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol.5, No. 1, hal: 55-83.
- Ramirez, A. G, Rannis, and F. Stewart. 1998. Economic Growth and Human Capital. *QEH Journal No.18*.
- Sriyana, Jaka. 2011. Disparitas Fiskal Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal*. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Whitaker, William H. Dan Ronald C. Fedrico. 1997. Sosial walfare in Today's world. *Journal*. New York: Mc Graw-Hill Companies.